

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan yang signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia. Laporan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI menyebutkan bahwa pada triwulan I 2020, realisasi PAD di Indonesia mengalami penurunan yang cukup besar, dengan beberapa daerah mengalami penurunan hingga lebih dari 30%. Secara keseluruhan, pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi menurun tajam akibat pembatasan sosial yang mempengaruhi sektor-sektor seperti pariwisata, restoran, dan hiburan.

Berdasarkan laporan DJPK mencatat bahwa secara keseluruhan, realisasi PAD pada 2020 mengalami penurunan sekitar 10-15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan beberapa daerah mengalami penurunan lebih dari 30%. Penurunan ini berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, yang pada akhirnya mendorong ketergantungan yang lebih besar terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Selain itu, meskipun ada peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah yang terdampak, hal ini tidak sepenuhnya bisa menggantikan penurunan yang terjadi pada PAD. Laporan DJPK ini menggambarkan betapa besar dampak pandemi terhadap kinerja keuangan daerah, yang mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan ekspektasi PAD mereka dan mengandalkan dana dari pusat untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah krisis.

Selama periode 2020–2022, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau mengalami tekanan signifikan akibat dampak pandemi COVID-19 dan tantangan fiskal lainnya. Pada tahun 2020, rasio PAD terhadap belanja daerah menurun menjadi 24,34 %, mencerminkan rendahnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan belanja daerah akibat penurunan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp2,884 triliun dibandingkan tahun sebelumnya akibat pandemi yang menekan aktivitas ekonomi lokal. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang lebih tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat dan menurunkan kemandirian fiskal daerah. Selanjutnya, realisasi pendapatan PAD hingga triwulan II 2022 tercatat hanya mencapai sekitar 38,85 % dari anggaran, di mana penerimaan pajak daerah dan retribusi sangat rendah. Rendahnya realisasi PAD mengakibatkan proyeksi pendapatan daerah sering direvisi dan memengaruhi kemampuan pemerintah provinsi dalam memenuhi target belanja dan pembiayaan pembangunan lokal.

UU Nomor 33 Tahun 2004 yang digantikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pada hakekatnya memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Selaras dengan Mahmudi (2014) tujuan dari penerapan otonomi daerah antara lain untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah

Daerah dituntut untuk dapat mengembangkan, mengoptimalkan, dan menggali sumber-sumber pendapatan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan elemen penting bagi lembaga pemerintahan dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah juga merupakan perwujudan yang nyata dari kemandirian suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya daerah.

Pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang telah ditentukan oleh daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, diikuti dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, Sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga barang satu atau dua saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali kenaikan itu meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari

barang-barang lain (Siti Nurul Afiyah, 2020). Inflasi dapat mengindikasikan melemahnya daya beli yang diikuti dengan penurunan nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara. Semakin tinggi tingkat inflasi menunjukkan bahwa daya beli masyarakat semakin melemah. Angka inflasi memiliki hubungan atau pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika nilai inflasi tinggi memang akan menurunkan kemampuan/daya beli masyarakat, namun harga-harga kebutuhan pokok akan meningkat secara umum dan terus menerus. Hal tersebut secara tidak langsung juga akan mengakibatkan kenaikan nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah (Dian Ramdani, Darmansyah, 2021). Di sisi lain, inflasi juga memiliki efek yang sebaliknya. Dengan naiknya harga-harga barang atau jasa, akan ada beberapa kelompok individu yang akan menekan konsumsi mereka baik kebutuhan primer, terutama untuk kebutuhan sekunder dan tersier Caesar Muslim, Syahrir Mallongi, (2019).

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut. Sebagai salah satu indikator makro ekonomi, pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Dalam perhitungan PDRB digunakan dua macam harga, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada satu tahun tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi sedangkan PDRB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Ernita & Penuh, (2021)

Kinerja PAD Kepulauan Riau dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi selama periode 2020–2024. Inflasi, sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi, dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dan daya beli masyarakat, berdampak pada penerimaan daerah. Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menunjukkan *output* ekonomi daerah, merupakan indikator penting untuk menentukan sejauh mana aktivitas ekonomi dapat berkontribusi pada PAD. Sumber pendapatan utama lainnya, seperti pajak daerah dan retribusi daerah, juga berperan besar dalam menentukan tingkat pendapatan daerah.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) telah banyak dilakukan sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh Yuliani, A., Surya, (2019) yang menganalisis pengaruh inflasi, produk domestik regional bruto (PDRB), dan pajak daerah terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap PAD, sementara PDRB dan pajak daerah berkontribusi positif terhadap peningkatan PAD.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, A., Hartini, 2021) mengkaji peran retribusi daerah dalam meningkatkan PAD di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berperan signifikan, tetapi kontribusinya masih lebih rendah dibandingkan pajak daerah. Penelitian ini tidak membahas secara khusus peran retribusi dalam konteks provinsi kepulauan, di mana karakteristik geografis dan ekonomi yang unik dapat memengaruhi hasilnya. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, N., Sari, E., (2020) menyoroti pentingnya investasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan hubungannya dengan PAD. Penelitian mereka menyatakan bahwa investasi, baik domestik maupun asing, berperan penting dalam memperkuat sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu serta fenomena yang terjadi, peneliti akan melakukan penelitian yang berbeda dari sebelumnya dengan menganalisis pengaruh inflasi, PDRB dan investasi terhadap PAD di Kepulauan Riau. Penelitian ini difokuskan pada Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki karakteristik unik sebagai wilayah kepulauan. Penelitian ini fokus pada periode 2020-2024 yang juga memberikan kontribusi dalam memahami dampak pandemi COVID-19 terhadap struktur ekonomi daerah dan PAD di provinsi tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran praktis untuk pemerintah daerah tentang bagaimana mengelola sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini didasarkan pada adanya inkonsistensi hasil penelitian (*research gap*) dari para peneliti terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di satu sisi, beberapa studi menunjukkan bahwa variabel makroekonomi seperti Inflasi, PDRB, dan Investasi memiliki pengaruh kuat dalam meningkatkan penerimaan daerah, namun di sisi lain terdapat hasil penelitian yang justru menunjukkan hasil tidak signifikan atau bertolak belakang. Adanya pertentangan temuan ini menciptakan sebuah celah penelitian yang menuntut pengujian kembali, khususnya pada karakteristik wilayah yang spesifik seperti Provinsi Kepulauan Riau pada periode 2020-2024, guna memberikan kejelasan empiris mengenai hubungan variabel-variabel tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Apakah Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024?
3. Apakah Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024?

4. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara variabel Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024?

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka didapat batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta laporan lainnya yang relevan.
2. Penelitian ini dibatasi pada Provinsi Kepulauan Riau, mencakup 7 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang.
3. Penelitian ini dilakukan untuk periode 2020-2024.
4. Penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen.
5. Penelitian ini menggunakan Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Investasi sebagai variabel independen.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang ekonomi daerah, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai interaksi antara inflasi, PDRB dan Investasi. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan kajian ekonomi daerah di Indonesia, khususnya di wilayah kepulauan.

2. Aspek Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan PAD. Dengan mengetahui pengaruh berbagai faktor ekonomi terhadap PAD, pemerintah daerah dapat merancang strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan inflasi PDRB dan Investasi demi mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi kebijakan dalam mendorong investasi di daerah untuk memperkuat ekonomi lokal.

3. Aspek Akademis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam analisis ekonomi daerah. Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama, serta menjadi panduan dalam mengembangkan metode analisis yang lebih inovatif untuk studi kebijakan publik dan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini membuka peluang untuk mendalami lebih dalam dinamika pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, khususnya di provinsi-provinsi dengan karakteristik kepulauan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis bagi pembaca dalam memahami penelitian ini. Masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, batasan penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Bab kedua di dalamnya mengemukakan serta menjelaskan tentang hal-hal yang mendasari penelitian ini yang terjadi dari teori-teori ilmu pengetahuan yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian ini, hasil penelitian terdahulu serta hipotesis penelitian yang memberikan gambaran apa yang akan diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel perusahaan yang diteliti, jenis dan sumber data yang akan dipakai, metode pengumpulan data serta metode analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian, pengujian asumsi klasik serta pembahasan teoritik baik secara kuantitatif dan statistik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima berisi tentang kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, serta berisi tentang saran dan keterbatasan penelitian.

